



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Agustus 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : M. MUKHLIS RUDI PRIHATNO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 764714

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 8.000.000.000

1. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2500 m2/500 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.500.000.000
3. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Bangunan Seluas 30 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 530 m2/370 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
7. Tanah Seluas 20700 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
8. Tanah Seluas 514 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 1.050.000.000

1. MOBIL, SUZUKI JIMNY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000



3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2021, HASIL SENDIRI  
Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.052.000.000
III. HUTANG	Rp.	8.290.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	762.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.